

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. serta digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu dan



sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang terkait dengan urusan masing-masing perangkat daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024, disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palu. Selain itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dalam hal ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024,



merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu. Disamping itu, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) yang diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan khususnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan serta mengukur pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan realisasi



program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024, disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah



- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu;
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu



Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

17. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan;
18. Peraturan Walikota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 nomor 14).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu secara berkesinambungan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil / aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk



menentukan prioritas-prioritas pembangunan pertanian di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Perikanan, dan Bidang Penyuluhan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai;

2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, *monitoring* dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan di sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kota Palu dengan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu;
6. Acuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya





dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu.

7. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam arti luas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu selama tahun 2024.
8. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam arti luas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu selama tahun 2024.
9. Acuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I   Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan`

##### **BAB II   Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu TW II Tahun 2024 .



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan  
Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan  
Pangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  
Masyarakat

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan

BAB IV Penutup



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN**  
**PANGAN KOTA PALU TW II TAHUN 2024**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun Berkenaan.**

Pada Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu melaksanakan 12 ( Dua Belas ) program, 22 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
  - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
  - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman



- b. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
      - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
    - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
    - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
  - b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
  - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota



- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
    - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
      - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
      - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
  7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat
    - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
      - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
      - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
    - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
      - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  8. Program Penanganan Kerawanan Pangan
    - a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota



- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup
9. Program Pengawasan Keamanan Pangan
    - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
  10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
    - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
      - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    - a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
      - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
  12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
    - a. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap



- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan TW II Tahun 2024 menghasilkan capaian indikator kinerja output sebesar 31,19% yang termasuk dalam kategori predikat sedang. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 8.056.150.882,- atau 31,19% dari total target anggaran dalam Rencana Kerja 2024 sebesar Rp.25.828.671.227,-.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 pada TW II dari seluruh program/kegiatan telah dilaksanakan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah outputnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia, dari target capaian kinerja 1 Dokumen bulan atau 100 %, dengan rencana anggaran sebesar Rp.6.570.700,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.1.670.500,- atau 25.42%.





- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD outputnya Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia, target capaian kinerja 1 Dokumen atau 100%, dengan rencana anggaran sebesar Rp.6.974.450,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.282.500,- atau 4.05%.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD outputnya Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia, target capaian kinerja 1 Dokumen atau 100%, dengan rencana anggaran sebesar Rp.2.214.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0,- atau 0.00%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD outputnya Jumlah Laporan Realisasi Kinerja yang tersedia, target capaian kinerja 12 bulan atau 100% dengan rencana anggaran Rp.8.746.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.900.000,- atau 10.29%.

#### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN outputnya Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia, target capaian realisasi kinerja 2 Laporan atau 100% dengan rencana anggaran Rp.13.460.096.069,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.6.648.217.393 atau 49.39%.



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD outputnya jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia, target capaian realisasi kinerja 2 Laporan atau 100% dengan rencana anggaran Rp. 10.125.000,- terealisasi sampai TW II sebesar Rp. 1.800.000,- atau 17.78%.

### 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor outputnya Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia, target realisasi capaian kinerja 1 Paket atau 100% dengan rencana anggaran Rp.1.758.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0 atau 0%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor outputnya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, terget capaian kinerja 3 Paket item atau 100% dengan rencana anggaran Rp.34.012.100,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0,- atau 0%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor outputnya Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia, target capaian kinerja 1 Paket atau 100% dengan rencana anggaran Rp.72.585.900,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.1.510.000 atau 2.08%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan outputnya Jumlah Barang Cetak dan



Penggandaan yang tersedia, target capaian kinerja 1 Paket atau 100% dengan rencana anggaran Rp.10.500.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0 atau 0%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan outputnya Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, target capaian kinerja 24 Dok atau 100% dengan rencana anggaran Rp.3.600.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.900.000 atau 25.00%.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu outputnya Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang tersedia, target capaian kinerja 1 Laporan atau 100% dengan rencana anggaran Rp. 16.500.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0 atau 0%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD outputnya Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara, target capaian kinerja 12 Laporan atau 100% dengan rencana anggaran Rp.376.985.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.142.968.680,- atau 37.92%.

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik outputnya Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia, target capaian kinerja 12 Laporan



atau 100% dengan rencana anggaran Rp.209.000.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.60.755.299,- atau 29.07%.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor outputnya Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang tersedia, target capaian kinerja 12 Laporan atau 100% dengan rencana anggaran Rp.2.238.828.500,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 948.650.560,- atau 42.37%.

#### 1.5 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan outputnya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia, target capaian 60 Unit atau 100% dengan rencana anggaran Rp.565.200.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.132.200.000 atau 23.39%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan outputnya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia, target capaian 42 unit atau 100% dengan rencana anggaran Rp.78.800.000,- terealisasi



sampai dengan TW II sebesar Rp.12.000.000 atau 15.23 %.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya outputnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara, target capaian 53 unit atau 100% dengan rencana anggaran Rp.24.180.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0 atau 0%.
- Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya outputnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara, target capaian 1 Unit atau 100% dengan rencana anggaran Rp.26.380.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0 atau 0%.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :

2.1 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman outputnya Jumlah Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman yang terjamin, target capaian 1062 Pohon atau 100% dengan rencana realisasi Rp. 47.431.300,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.1.514.400,- atau 3.19%.



- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman outputnya Jumlah Kualitas SDG Hewan/Tanaman yang meningkat, target capaian 1 Dokumen atau 100% dengan rencana realisasi Rp.57.464.970 terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman outputnya Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dimanfaatkan, target capaian 4 Dokumen atau 100% dengan rencana realisasi Rp.1.506.886.450,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.4.995.000,- atau 0.33%.

## 2.2 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain outputnya Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain yang tersedia, target capaian 100 Ekor atau 100%, dengan rencana realisasi Rp. 2.146.646.250,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.23.311.050,- atau 1.04%.

## 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian :

### 3.1 Pengembangan Prasarana Pertanian.



- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B outputnya Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang tersedia, target capaian 4 Dokumen atau 100%, dengan rencana realisasi Rp.580.158.500,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0%.
  - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan outputnya Jumlah Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan yang tersusun, target capaian 1 Dokumen atau 100%, dengan rencana realisasi Rp.21.118.500,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0,- atau 0%.
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan :
- 4.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis outputnya Jumlah Penyakit Hewan dan Zoonosis yang terkendali, target capaian 2750 Ekor atau 100%, dengan



rencana realisasi Rp.58.990.200,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

#### 4.2 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan outputnya Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang terdampingi, target capaian 3 Laporan atau 100%, dengan rencana realisasi Rp. 199.409.938,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 350.000,- atau 0.18%.

#### 5) Program Perizinan Usaha Pertanian.

##### 5.1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian outputnya Jumlah Penerapan Izin Usaha Pertanian yang terbina, target capaian 2 Laporan bulan atau 100%, dengan rencana realisasi Rp. 22.791.900,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.15.269.900,- atau 67.00%.

#### 6) Program Penyuluhan Pertanian

##### 6.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa outputnya Jumlah Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa





yang meningkat, target capaian 59 Orang atau 100%, dengan rencana realisasi Rp.122.528.150,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 808.150,- atau 0.66%.

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa outputnya Jumlah Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang dikembangkan, target capaian kinerja 1 Kegiatan atau 100%, dengan rencana anggaran Rp. 120.759.950,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.6.000.000,- atau 4.9%.
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian outputnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang tersedia, target capaian kinerja 8247 atau 100%, dengan rencana anggaran Rp.88.799.750,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

7) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat

7.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan outputnya Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang tersedia, target capaian kinerja 12 Laporan atau



100% dengan rencana anggaran Rp.136.506.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.4.371.900,- atau 3.20%.

- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan outputnya Jumlah Stok, Pasokan dan Harga Pangan yang tersedia, target capaian kinerja 12 Dokumen atau 100% dengan rencana anggaran Rp.16.234.100,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.0,- atau 0%.

#### 7.2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun outputnya Jumlah Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun yang ditetapkan, target capaian kinerja 1 Dokumen item atau 100% dengan rencana anggaran Rp. 64.379.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal outputnya Jumlah Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang diberdayakan, target capaian kinerja 12 Laporan atau 100% dengan rencana anggaran Rp. 57.567.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0%.



## 8) Program Penanganan Kerawanan Pangan

### 8.1 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota outputnya Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana, target capaian kinerja 12 Dokumen atau 100% dengan rencana anggaran Rp. 114.944.850,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

## 9) Program Pengawasan Keamanan Pangan

### 9.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota outputnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia, target capaian kinerja 2 Dokumen atau 100% dengan rencana anggaran Rp.30.602.650,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0%.



## 10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

10.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap outputnya Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia, target capaian kinerja 100 Unit atau 100% dengan rencana anggaran Rp.1.714.617.000,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.1.815.000,- atau 0.11%.

## 11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

11.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota outputnya Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia, target capaian kinerja 19 Unit atau 100% dengan rencana anggaran Rp.1.059.398.600 terealisasi sampai dengan TW II Rp. 20.760.100 atau 7.76%.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota outputnya Jumlah Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang



terjamin, target capaian kinerja 3 Unit atau 100% dengan rencana anggaran Rp.49.846.850,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp.5.656.650 atau 11.35%

12) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

12.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota outputnya Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang diberikan, target capaian kinerja 4 Pelaku Usaha atau 100% dengan rencana anggaran Rp.113.428.600,- terealisasi sampai dengan TW II sebesar Rp. 0,- atau 0.83%.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan TW II menghasilkan capaian indikator kinerja output sebesar 31.21 % dari target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.8.060.522.782,- atau dari total target anggaran dalam Rencana Kerja 2023 TW II sebesar Rp.25.828.671.227,-.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, beberapa hal yang akan di evaluasi adalah :



1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu dari beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target masih dalam proses pembuatan SPJ dan masih dalam pemesanan barang.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ada beberapa hampir keseluruhan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2024 pada TW II yang belum tercapai sesuai target.
3. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tahun 2024 pada TW II adalah karena beberapa kegiatan menunggu proses SPJ.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan adalah untuk di TW selanjutnya di tahun 2024 dalam proses pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan.

Dengan belum terlaksananya seluruh target kinerja hasil/keluaran dari program/kegiatan memberikan implikasi yang negatif terhadap pencapaian target program Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dimana belum dapat mempercepat pencapaian target sehingga menjadi beban pada



tahun selanjutnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab tercapainya sebagian target kinerja program/kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2024 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini.



**Tabel 2.1.**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu s/d Triwulan II Tahun 2024**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia	7.250.000	6.570.350	6.570.700	1.670.500	25.42%	8.240.850	113.67
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	10.000.000	7.515.000	6.974.450	282.500	4.05%	7.797.500	77.98
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	8.500.000	1.839.000	2.214.000	0	0.00%	1.839.000	21.64





3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja yang tersedia	11.000.000	8.806.450	8.746.000	900.000	10.29%	9.706.450	88.24
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	10.938.050.752	10.880.477.378	13.460.096.069	6.648.217.393	49.39%	17.528.694.771	160.25
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.000.000	4.050.000	10.125.000	1.800.000	17.78%	11.925.000	65.25
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1.300.000	1.765.500	1.758.000	0	0%	1.765.500	135.81
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	55.000.000	228.633.600	34.012.100	0	0%	228.633.600	415.70
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	75.000.000	76.614.200	72.585.900	1.510.000	2.08%	78.124.200	107.63
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15.000.000	10.500.800	10.500.800	0	0%	10.500.800	100.00



3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	3.600.000	3.600.000	900.000	25.00%	4.500.000	62.50
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang tersedia	23.375.000	12.187.500	16.500.000	0	0%	12.187.500	52.14
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	593.199.000	441.245.090	376.985.000	142.968.680	37.92%	687.522.359	115.90
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14.000.000	15.552.100	5.472.000	0	0%	15.552.100	111.09
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	254.839.642	190.261.677	209.000.000	60.755.299	29.07%	251.016.976	98.50
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang tersedia	1.910.000.000	1.908.240.863	2.238.828.500	948.650.560	42.37%	2.856.891.423	149.58
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	600.300.000	518.651.800	565.200.000	132.200.000	23.39%	650.851.800	108.42



	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia							
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia	96.000.000	73.506.800	78.800.000	12.000.000	15.23%	85.506.800	89.07
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	8.000.000	24.200.000	24.180.000	0	0%	24.200.000	305.50
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	2.000.000	6.400.000	26.380.000	0	0 %	6.400.000	320.00
<b>3.27.02</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>								
3.27.02.2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman yang terjamin	114.000.000	56.952.070	47.431.300	1.514.400	3.19%	58.466.470	51.29



3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kualitas SDG Hewan/Tanaman yang meningkat	100.000.000	96.254.000	57.464.970	0	0%	96.254.000	96.25
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dimanfaatkan	1.100.000.000	1.631.506.714	1.506.886.450	4.995.000	0.33%	1.636.501.714	148.77
3.27.02.2.06	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>								
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain yang tersedia	1.073.970.352	2.663.247.445	2.146.646.250	22.311.050	1.04%	2.685.558.495	250.06
3.27.03	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>								
3.27.03.2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>								
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang tersedia	843.965.544	2.585.671.029	580.158.500	0	0%	2.585.671.029	306.37



3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan yang tersusun	55.000.000	30.107.000	21.118.500	0	0%	30.170.000	54.85
3.27.04	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>								
3.27.04.2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Penyakit Hewan dan Zoonosis yang terkendali	102.000.000	133.792.450	58.990.200	0	0%	133.792.450	131.17
3.27.04.2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>								
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang terdampingi	257.586.218	161.190.940	199.409.938	350.000	0.18%	317.797.790	123.38
3.27.06	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>								
3.27.06.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah</b>								



	<b>Kabupaten/Kota</b>									
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Izin Usaha Pertanian yang terbina	40.306.184	22.256.900	224.442.250	3.485.600	15.53%	25.742.500	63.87	
0.27.07	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>									
0.27.07.2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>									
0.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang meningkat	144.000.000	129.123.684	122.528.150	808.150	0.66%	305.310.859	212.02	
0.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang dikembangkan	483.022.887	635.293.530	120.759.950	6.000.000	4.97%	641.293.530	132.77	
0.27.07.02.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang tersedia	100.000.000	143.069.450	88.799.750	0	0%	118.072.600	118.07	
2.09.03	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat</b>									
2.09.03.2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah/Kota</b>									



	<b>dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>									
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang tersedia	55.000.000	362.455.950	136.506.000	4.371.900	3.20%	366.827.850	666.96	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Stok, Pasokan dan Harga Pangan yang tersedia	75.000.000	18.865.250	16.234.100	0	0%	16.234.100	21.65	
2.09.03.2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>									
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun yang ditetapkan	80.000.000	44.267.000	64.379.000	0	0%	44.267.000	55.33	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang diberdayakan	260.000.000	63.548.000	57.567.000	0	0%	63.548.000	24.44	
2.09.04	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>									
2.09.04.2.01	<b>Penanganan Kerawanan</b>									



	<b>Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									
2.09.04.2.01.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	595.999.256	110.925.962	114.944.850	0	0%	110.925.962	18.61	
2.09.05	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>									
2.09.05.2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	64.566.586	33.602.650	30.196.800	0	%	33.602.650	52.04	
3.25.03	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>									
3.25.03.2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah</b>									





	<b>kabupaten/Kota</b>								
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	1.688.664.558	2.273.376.369	1.714.617.000	1.815.000	0.11%	2.275.191.369	134.73
3.25.04	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>								
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>								
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	883.398.772	824.260.280	1.059.398.600	20.760.100	1.96%	845.020.380	95.66
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang terjamin	100.000.000	48.754.150	49.846.850	5.656.650	11.35%	54.410.800	54.41
3.25.06	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>								
3.25.06.2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								



3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang diberikan	272.172.994	51.622.850	113.428.600	0	0%	51.622.850	18.97
-----------------	--	--	-------------	------------	-------------	---	----	------------	-------



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

Pencapaian kinerja pelayanan dapat di ukur berdasarkan indikator yang telah di tetapkan di dalam Renstra. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat di lihat pada tabel 2.2 di bawah ini.



**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	<b>Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>			BB	BB	A	A	C	BB	A	A	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu		-	CC	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
II	<b>Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)</b>			4,10	4,20	4,30	4,40	3,95	4,20	4,30	4,40	IKU Esselon II
-	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)			5,57	5,63	5,68	5,74	4,57	5,63	5,68	5,74	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-16,69	-10,00	-10,00	-10,00	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III



	menular											
-	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (ton)			1.184,72	1.220,26	1.256,87	1.294,57	1.989,55	1.220,26	1.256,87	1.294,57	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
<b>III</b>	<b>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</b>			150	150	150	150	105,19	150	150	150	IKU Esselon II
-	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)			3.100	3.100	3.100	3.100	1.860	3.100	3.100	3.100	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)			72,90	72,90	72,90	72,90	58,80	72,90	72,90	72,90	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			81,41	82,22	83,04	83,87	80,30	82,22	83,04	83,87	IKU Esselon II



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Jajaran Pemerintahan Daerah Kota Palu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu perlu melakukan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan, penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan perizinan dan pelayanan pada bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu (DPKP) dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Palu No. 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Palu No. 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. DPKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang diberikan kepala daerah.
- b) Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan ketahanan pangan.



- c) Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah
- d) Penyusunan standar pembibitan yang menjadi kewenangan daerah
- e) Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah.
- f) Penyusunan program Diklat SDM/aparat pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan.
- g) Melakukan pembinaan, pengawasan dan perijinan serta pembinaan usaha pertanian dan ketahanan pangan.
- h) Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dan ketahanan pangan
- i) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
- j) Menyelenggarakan usaha pengelolaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
- k) Pengelolaan unit pelaksana Teknis Dinas

Dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan



4. Pelaksanaan administrasi bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Melalui analisis lingkungan internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, dapat dilihat apa kekuatan dan bagaimana kelemahan dalam sebuah organisasi, sehingga dengan melakukan analisis internal akan membantu suatu lembaga agar dapat mengoptimalkan kekuatan yang ada dan meminimalkan kelemahannya. Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

Disamping itu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, juga dikembangkan strategi yang spesifik sesuai dengan kondisi lokal. Untuk mengembangkan strategi pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan karakter wilayah kota Palu, maka diperlukan analisis aspek-aspek manajemen pembangunan dengan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Treats*). Melalui analisis ini dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari faktor – faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor – faktor eksternal terhadap pembangunan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Kekuatan.

Sebagai identifikasi kekuatan (strenght), pada dasarnya merupakan suatu pengenalan terhadap lingkungan internal.

Kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah :

- Ketersediaan Sumberdaya manusia yang memadai
- Kelembagaan institusi pertanian yang makin lengkap (UPTD2 yang terintegrasi)





- Dukungan kebijakan dan regulasi daerah dan nasional
- Infrastruktur pertanian tersedia lebih baik

## 2. Kelemahan

Seperti fungsi kekuatan (strength), kelemahan pun (weakness) merupakan suatu pengenalan terhadap lingkungan internal organisasi, sehingga kelemahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan. (Indikasi ini dijumpai pada hal-hal sebagai berikut : (i) kapabilitas pelaksana tugas belum memadai; penugasan tidak sesuai dengan keahlian utama; beberapa tenaga khusus yang dibutuhkan belum tersedia).
- Peran dan fungsi UPT belum optimal. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi serta sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPT belum terjalin dengan baik.
- Belum optimalnya penguasaan informasi pasar pada beberapa sub sektor.
- Belum konsistennya data statistik pertanian
- Peran dan fungsi kelembagaan petani belum optimal
- Sarana dan prasarana belum memadai
- Terbatasnya alokasi anggaran
- Belum optimalnya sistem pengendalian internal

Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk menginventarisasi adanya peluang dan tantangan / ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu didasarkan pada :

- Faktor eksternal
- Faktor yang sangat kritis dalam mendukung atau



menghambat perkembangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

- Kebijakan yang dapat mempengaruhi dan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

### 3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu antara lain :

- Pasar produksi pertanian dan perikanan masih terbuka luas
- Potensi lingkungan cukup baik untuk meningkatkan produktivitas
- Cukup tersedia tenaga kerja dan relatif lebih murah
- Sumberdaya genetik lokal cukup tersedia
- Lahan-lahan tidur dan tidak dimanfaatkan masih cukup luas.
- Berkembangnya industri hasil pengolahan hasil pertanian
- Akses kerjasama dengan berbagai lembaga terbuka luas.
- Palu sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian dan kehutanan Sulawesi Tengah.

### 4. Tantangan (Threats)

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu antara lain :

- Penguasaan teknologi pertanian (hulu dan hilir) oleh masyarakat petani masih minim.
- Luas areal pengembangan pertanian terbatas, alih fungsi lahan berlangsung cepat, nilai lahan makin mahal, luas lahan kritis terus bertambah.
- Banyaknya produk-produk dari luar yang menyaingi pasar lokal.



- Sistem pertanian yang dijalankan petani belum ramah lingkungan.
- Menurunnya minat masyarakat terhadap usaha tani dan beralih ke usaha pertambangan.
- Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam /kerusakan lingkungan.
- Kemampuan permodalan petani terbatas, akses petani ke sumber permodalan rendah.
- Ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura terbatas.
- Anomali Iklim.

Isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah sebagai berikut :

- 1) **Alih Fungsi Lahan Pertanian** Kota Palu, disadari bahwa Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi dimana alih fungsi penggunaan lahan dari lahan pertanian ke peruntukan lainnya tidak bisa dihindarkan, sehingga diperlukan langkah antisipasi perlindungan lahan pertanian produktif serta pola pertanian yang mengarah pada pertanian perkotaan.
- 2) **Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**, Jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2022 tercatat sebanyak 381.572 jiwa ( BPS Tahun 2023). Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 377.030 jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,27 %. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Palu khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumber daya lahan pertanian sebagai "*pabrik*" bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan cenderung terus berkurang sebagai akibat



tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya.

- 3) **Kemiskinan**, dari jumlah sebanyak 381.572 jiwa penduduk di Kota Palu pada Tahun 2022, 26.750 Jiwa atau (6,63 %) di antaranya adalah Penduduk Miskin. Sebagian besar Petani Nelayan berada di kategori miskin.
- 4) **Ketahanan Pangan**, Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan, termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan. Permasalahan Gizi dapat pula dipengaruhi oleh perubahan pada gaya hidup terutama pola makan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.4. (terlampir).



**Tabel 2.3.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	<b>14.673.256.094</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25.828.671.227	
-	Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	<b>25.106.150</b>	Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	24.505.150	
1	Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	6.570.700	Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	6.570.700	
2	Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.515.000	Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	6.974.450	



3	Koordinasi dan penyusun Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2.214.000	Koordinasi dan penyusun Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2.214.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.806.450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	8.746.000	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi keuangan	1 Thn	<b>11.418.241.644</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi keuangan	1 Thn	13.470.221.069	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 orang / Bln	11.414.191.644	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 orang/ Bln	13.460.096.069	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	4.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	10.125.000	



			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perkantoran	1 Tahun	<b>695.516.700</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perkantoran	1 Tahun	515.941.800	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.765.500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.758.000	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	171.719.700	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	17.000.000	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76.614.200	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.851.800	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.500.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.500.800	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.600.000	
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.962.500	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	16.500.000	



7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	419.354.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	498.335.000	
-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	<b>15.552.100</b>	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	8.840.000	
1	Pengadaan meubel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	15.552.100	Pengadaan meubel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	8.840.000	
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	<b>1.816.214.500</b>	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.296.000	
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.613.214.500	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.066.278.300	
-	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	<b>702.625.000</b>	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		





			Daerah					Daerah			
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	565.200.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	479.000.000	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	106.825.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	78.800.000	
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	24.200.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	24.180.000	
4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	6.400.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	21.384.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Palu	Produksi perikanan tangkap (ton)	1090 Ton	<b>2.465.320.000</b>	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Palu	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1090 Ton	1.649.514.950	
-	Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan		Cakupan pengelolaan penangkapan ikan	100%	<b>2.465.320.000</b>	Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau,		Cakupan pengelolaan penangkapan ikan	100%	1.649.514.950	



	genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota					waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota					
1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Palu	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100 Unit	<b>2.465.320.000</b>	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Palu	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100 Unit	1.649.514.950	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya (ton)	130 Ton	<b>1.734.381.500</b>	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya (ton)	130 Ton	1.659.894.400	
-	Pengelolaan Pembudidayaan ikan		Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	<b>1.734.381.500</b>	Pengelolaan Pembudidayaan ikan		Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	1.659.894.400	
1	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kota Palu	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19 Unit	1.628.129.500	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kota Palu	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	1.623.026.250	
2	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kota Palu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3 Unit	106.252.000	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kota Palu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	36.868.150	
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) Persentase capaian pengolahan dan	75,35 % 100 %	<b>200.188.465</b>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) Persentase capaian pengolahan dan	75,35% 100 %	69.724.800	



			pemasaran hasil perikanan					pemasaran hasil perikanan			
-	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	<b>200.188.465</b>	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	69.724.800	
1	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Kota Palu	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku Usaha	<b>200.188.465</b>	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Kota Palu	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku Usaha	69.724.800	
V	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pengembangan Sarana Pertanian	100%	<b>4.677.927.550</b>	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pengembangan Sarana Pertanian	100%		
-	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota		Cakupan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota	100%	<b>1.838.160.800</b>	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota		Cakupan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota	100%		
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Kota Palu	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	57.132.070	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Kota Palu	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	33.533.500	



2	Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Kota Palu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dok	104.373.400	Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Kota Palu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dok	35.973.200
3	Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Kota Palu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dok	1.676.655.330	Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Kota Palu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dok	1.418.256.400
-	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	<b>2.839.766.750</b>	Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota		Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Ternak	100%	1.572.167.250
4	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Palu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	2,839,766,750	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Palu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	1.572.167.250
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	<b>958.336.350</b>	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	
-	Pengembangan Prasarana Pertanian		Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian Tani	100%	<b>958.336.350</b>	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	100%	



1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kota Palu	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang Dikelola	4 Dokumen	928.229.350	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kota Palu	Jumlah Fasilitas Kelompok Tanaman Pangan	4 Dokumen	309.958.500	
2	Peningkatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kota Palu	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dok	30.107.000	Peningkatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kota Palu	Jumlah Fasilitas Kelompok Perkebunan	1 Dok	16.388.500	
VII	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100% 10%	<b>367,553,530</b>	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	100% 10%		
-	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	100%	<b>151,492,450</b>	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah		Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan	100%	58.990.200	



			kabupaten/kota			Kabupaten/Kota					
1	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Palu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2750 ekor	151,492,450	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Palu	Jumlah Penyakit Hewan Yang Ditangani	2750 ekor	58.990.200	
-	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Cakupan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	<b>216,061,080</b>	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Terlaksannya Pengawasan Teknis Kesmavet	100%	58.990.200	
2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Kota Palu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	216,061,080	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Kota Palu	Jumlah Ternak yang Terawasi Kesmavet di RPH	3 Laporan	173.142.344	
VII I	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	<b>22.791.900</b>	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Meningkatnya Layanan Perizinan Usaha Pertanian	100%	11.242.250	
-	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	100%	<b>22.791.900</b>	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Ijin Usaha Yang diterbitkan	100%	11.242.250	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kota Palu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	<b>22.791.900</b>	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kota Palu	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertanian	2 Laporan	11.242.250	
IX	PROGRAM		Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	15 % 100 %	<b>617.899.050</b>	PROGRAM		Meningkatnya Nilai	15 % 100 %		



	PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian			PENYULUHAN PERTANIAN		Tukar Petani/ Nelayan Kota Palu			
-	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	<b>617.899.050</b>	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%		
1	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	59 Orang	133,587,100	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	59 Orang	161.489.700	
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Palu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Keg.	401,587,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Palu	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Nelayan	1 Keg.	161.489.700	
3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terbentuknya dan terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	5Unit	88.799.950	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terbentuknya dan terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	5Unit	50.362.050	
4	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8247 Unit	82,724,950	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Palu	Terlaksananya pemanfaatan metode penyuluhan	8247 Unit	65.909.950	



X	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN		Terwujudnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pangan Kota Palu		<b>535,520,450</b>	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN		Terwujudnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pangan Kota Palu			
-	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Cakupan penyediaan Pangan Pokok dengan Harga Terjangkau	100 %	<b>421,073,450</b>	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Cakupan penyediaan Pangan Pokok dengan Harga Terjangkau	100 %		
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Palu	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	376,509,200	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Palu	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	76.298.000	
2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Palu	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	44,564,250	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Palu	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	15.798.000	
3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	100 Keluarga	64.379.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	100 Keluarga	44.179.000	
-	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	25 Ton	71.327.000	





-	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Tercapainya Target Konsumsi Pangan Kota Palu	100 %	<b>114,447,000</b>	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Tercapainya Target Konsumsi Pangan Kota Palu	100 %		
1	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Kota Palu	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Kota Palu	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		
2	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kota Palu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	50,066,000	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kota Palu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	41.967.000	
XI	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	100%	<b>124,823,542</b>	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	100%		
-	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penanganan Daerah/ Lingkungan Rawan Pangan yang diintervensi	100%	<b>124,823,542</b>	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penanganan Daerah/ Lingkungan Rawan Pangan yang diintervensi	100%	61.809.850	
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan	Kota Palu	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	12 Dokumen	124,823,542	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	Kota Palu	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	12 Dokumen	61.809.850	



	Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot		pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot			Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot		pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot			
XII	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Menurunnya pelanggaran Keamanan Pangan	100%	<b>38,811,400</b>	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Menurunnya pelanggaran Keamanan Pangan	100%	8.239.300	
-	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan	100%	<b>38,811,400</b>	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan	100%	8.239.300	
1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	<b>38,811,400</b>	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.239.300	



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peran serta dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan perubahan rencana kerja dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rapat forum PD/Gabungan PD, serta kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Palu dan diadakan di setiap kelurahan yang ada di kota Palu. Selain Musrenbang regular biasa, mulai tiga tahun terakhir dilaksanakan **Musrenbang Inklusif** untuk mengakomodir kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang terakomodir pada musrenbang biasa. Musrenbang merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah khususnya Pertanian dan Ketahanan Pangan dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya. Musrenbang juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat. serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun Tahun 2024 yang mana di dalamnya termuat usulan musrenbang, musrenbang inklusif dan pokir dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini :



**Tabel 2.4**  
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2024  
Kota Palu

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Jenis Usulan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jln. Batu BataIndah No. 36	Bantuan Bibit Ayam Kampung Super dan Pakan	1 Kelompok	
2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kel. Nunu	Bantuan Bibit dan Pakan Ayam Kampung Super	1 Paket	
3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kel. Talise	Bantuan bibit ternak ayam kampung super	1 Kelompok	
4	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kel. Petobo	Bantuan Pengembangan Ternak Ayam Petelur	1 Paket	
5	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kel. Bayaoge	Bantuan Ternak Kambing	10 Ekor	
6	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jalan S. Palayua RW 03 Kelurahan Taipa	Bantuan Ternak Sapi	17 Ekor	
7	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jalan S. Palayua RW 03 Kelurahan Taipa	Bantuan Ternak Sapi	19 ekor	
8	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Bantuan Bibit ayam kampung Super dan Pakan	700 Ekor	
9	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Bantuan Bibit ayam kampung Super dan Pakan	700 Ekor	
10	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Bantuan Bibit ayam kampung Super dan Pakan	700 Ekor	
11	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Bantuan Bibit ayam kampung Super dan Pakan	700 Ekor	



12	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Bantuan Bibit ayam kampung Super dan Pakan	700 Ekor	
13	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jalan Pangeran Hidayat Kel. Lere	Batuan Ternak Kambing	19 Ekor	
14	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jalan Selar	Batuan Ternak Kambing	8 Ekor	
15	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu Selatan dan Tatanga	Bantuan Benih Ikan Nila dan Pakan	10150 Ekor	
16	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu Selatan	Bantuan Benih Ikan Lele dan Pakan	4550 Ekor	
17	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Birobuli Selatan dan Lolu Selatan	Bantuan Pakan	31 Zak	
18	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Birobuli Selatan dan Lolu Selatan	Bantuan Benih Ikan Nila dan Lele	9246 Ekor	
19	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Palupi	Bantuan Benih Ikan Nila	5100 Ekor	
20	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Palupi	Bantuan Benih Ikan Nila	1 Paket	
21	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Palu Timur	Bantuan Benih Ikan Lele dan Pakan	1 Paket	
22	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
23	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Petobo dan Tatura Utara	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
24	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Tatura Utara	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
25	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Birobuli Selatan	Bio flog ikan Nila	1 Paket	



26	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Besusu Tengah	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
27	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Talise	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
28	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu Barat dan Tatanga	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
29	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu Barat	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
30	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu selatan 2	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
31	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu Selatan 3	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
32	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu Utara 2	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
33	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Palu Timur	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
34	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Ulujadi	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
35	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kecamatan Palu Utara 1	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
36	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kecamatan Palu Selatan 1	Bio flog ikan Nila	1 Paket	
37	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Taipa	Bantuan Alat Pengolahan Tanah Kel. Taipa	1 Paket	
38	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Kawatuna	Bantuan Hand Traktor	1 Unit	
39	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Besusu Tengah	Bantuan Hidroponik	1 Paket	



40	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Duyu	Bantuan Pupuk Kandang Untuk Kampung Anggur Duyu	8572 Kg	
42	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Bantuan Pupuk	1282 Kg	
43	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kel. Petobo	Bantuan hidroponik apung	1 Paket	
44	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Tanamodindi	Bantuan Hidroponik	1 Paket	
45	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Besusu Tengah	Bantuan Hidroponik	1 Paket	
56	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Lolu Utara	Bantuan Hidroponik	1 Paket	
57	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Siranindi	Bantuan Hidroponik	1 Paket	
48	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Tatura Selatan	Bantuan Hidroponik	1 Paket	
49	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Layana Indah	Bantuan Saprodi Buah Anggur	1 kelompok	
50	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Donggala Kodi	Bantuan Bibit Bawang Merah	1 Paket	
51	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Pantoloan Boya	Bantuan Bibit Bawang Merah	1 Paket	
52	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Pantoloan Boya	Bantuan Saprodi Cabai	1 Paket	
53	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan Petobo	Bantuan Saprodi Cabai	1 Paket	
54	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kel. Poboya	Bantuan Saprodi Rica Sirup	1 Paket	
55	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	kel. layana indah	Saprodi buah anggur	1 Paket	



### **BAB. III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu disusun berdasarkan hasil analisis dan masukan dari stakeholder proses perencanaan antara lain :

- Musrenbang (Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Palu).
- Musrenbang Inklusif.
- Penyusunan Program Penyuluhan (Kecamatan dan Tingkat Kota Palu).
- Hasil Reses anggota DPRD Kota Palu
- Sinkronisasi dengan program kegiatan Kementerian terkait.

Dari hasil analisis dan proses perencanaan yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa program kegiatan inovatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang sangat mendukung pencapaian Misi ke -1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global, dan Misi ke-4 Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Adapun program Inovatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain :

1. Pengembangan Pertanian Kota Palu Berbasis Agrowisata.
2. Pengembangan Ekonomi Pembudidaya ikan dan Masyarakat Pesisir Kota Palu.
3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kota Palu.





4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petugas dan Pelaku Usaha Pertanian/Perikanan Kota Palu
5. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.



**Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) 2024  
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

---

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas**  
**Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
A	<b>BIDANG PANGAN</b>						
1	Program Peningkatan diserfikasi dan ketahanan pangan masyarakat						
	<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan</i>						
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Palu	12 Laporan	76.298.000	APBD	
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Palu	12 Laporan	15.790.000	APBD	Satgas Pangan
	- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan		100 Kel.	44.179.000	APBD	Baru
	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>						
	- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah		25 Ton	71.327.000	APBD	baru
	<i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>						
	- Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Palu	1 dokumen			
	- Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Palu	2 laporan	41.967.000	APBD	
2	Program Penanganan kerawanan pangan						
	<i>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</i>						
	- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupten kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	2 dokumen	61.809.850	APBD	
3	Program pengawasan keamanan pangan						
	<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>						
	- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Palu	4 dokumen	8.239.300	APBD	
II	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
A	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
1	Program pengelolaan perikanan tangkap						
	<i>Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, dabau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang</i>						
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Palu	100 unit	1.649.514.950	APBD	



<b>2</b>	<b>Program pengelolaan perikanan Budidaya</b>						
	- <b>Pengelolaan Pembudidayaan ikan</b>						
	- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	15 unit	1.623.025.250	APBD	
	- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	1 unit	36.868.150	APBD	
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>						
	- <b>Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota</b>						
	- Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	4 pelaku usaha	69.724.800	APBD	
<b>B</b>	<b>BIDANG PERTANIAN</b>						
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	- <b>Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>						
	- Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	1 Dokumen	6.570.700	APBD	
	- Koordinasi dan penyusun dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	6.974.450	APBD	
	- Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Palu	1 Dokumen	2.214.000	APBD	
	- Koordinasi dan penyusun laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Palu	16 Laporan	8.746.000	APBD	
	- <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	129 orang/bulan	13.460.096.069	APBD	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Palu	1 laporan	10.125.000	APBD	
	- <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Palu	1 paket	1.758.000	APBD	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Palu	8 paket	17.000.000	APBD	
	- Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palu	1 paket	58.851.800	APBD	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	1 paket	10.500.800	APBD	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Palu	24 dokumen	3.600.000	APBD	
	- Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Palu	1 laporan	16.500.000	APBD	
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Palu	12 laporan	498.335.000	APBD	
	- <b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>						
	- Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 unit	8.840.000	APBD	
	- <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>						
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Palu	12 laporan	184.296.000	APBD	
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Palu	12 laporan	2.066.278.300	APBD	
	- <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>						
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	60 Unit	479.000.000	APBD	



## Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) 2024 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu

		- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	42 Unit	78.800.000	APBD		
		- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	53 Unit	24.180.000	APBD		
		- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan perasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	1 Unit	21.384.000	APBD		
<b>2</b>	<b>Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>								
	<b>Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota</b>								
		- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemumian	Palu	2 VUB	33.533.500	APBD		
		- Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Palu	1 Dokumen	35.973.200	APBD		
		- Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Palu	4 dokumen	1.418.256.400	APBD		
	<b>Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</b>								
		- Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Palu	100 Ekor	1.572.167.250	APBD		
<b>3</b>	<b>Program penyediaan dan pengembangan perasarana pertanian</b>								
	<b>- Pengembangan prasarana pertanian</b>								
		- Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang	Palu	4 dokumen	309.958.500	APBD		
		- Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Palu	1 Dokumen	16.388.500	APBD		
<b>4</b>	<b>Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</b>								
	<b>Penjaminan kesehatan hewan, penunjang dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</b>								
		- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Palu	1 laporan	58.990.200	APBD	Dak NF	
	<b>Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b>								
		- Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Palu	3 laporan	173.142.344	APBD		
<b>5</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>								
	<b>- Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</b>								
		- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Palu	2 laporan	11.242.250	APBD		
<b>6</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>								
	<b>- Pelaksanaan penyuluhan pertanian</b>								
		- Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Palu	46 unit	161.489.700	APBD		
		- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Palu	50 unit	84.728.150	APBD		
		- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Palu	47 unit	65.909.950	APBD		
		- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		5 Unit	50.362.050	DAK-NF	Dak NF	
<b>JUMLAH TOTAL PAGU</b>						<b>24.654.935.413</b>	-		



## Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) 2024 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palu serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran

Dengan adanya Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Palu maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

